

**PENGUMUMAN****LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 April 2018/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHMAD MAUSHUL
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 222229

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.520.300.000
1. Tanah Seluas 200 m2 di TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/110 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/152 m2 di 03VILA KENALI PERMAI M3 / 10 RT. 019 RW. Kode Pos. , [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 690.300.000		
4. Tanah Seluas 310 m2 di TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	125.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	28.130.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	101.565.642
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.774.995.642
III. HUTANG	Rp.	205.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.569.995.642

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 November 2018**.



-
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.